

SAATNYA APOTEKER BERPERAN MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

"Kami sepakat meningkatkan aktivitas pengawasan obat dan sediaan farmasi di sarana produksi dan distribusi serta pelayanan farmasi, sehingga tidak ada produk ilegal atau palsu, serta tidak ada diversifikasi lagi. Semua itu tidak lepas dari peran strategis Apoteker. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) harus dapat meneruskan kepada para apoteker anggotanya mengenai peran strategis ini. Kerja sama ini sangat bermakna untuk meningkatkan komunikasi dan peran masyarakat melalui pemberian edukasi kepada masyarakat.

Dengan pemberdayaan masyarakat yang benar, diharapkan masyarakat makin cerdas sehingga dapat menggunakan obat dengan benar," demikian disampaikan kepala Badan POM, Roy Sparringa



usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan IAI dalam acara Rapat Kerja Nasional dan pertemuan ilmiah tahun 2015 yang mengusung tema "Enhancing Pharmacist Competence in Sustainable Health", 7 - 10 Mei 2015 di Hotel The Hills dan Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Sumatera Barat.

Acara rakernas yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno dilanjutkan dengan minum jamu bersama yang dipimpin oleh Kepala

Badan POM dan diikuti oleh seluruh peserta rakernas lebih dari 1500 orang peserta. Acara dilanjutkan dengan pembukaan pameran oleh Kepala BPOM, dimana BPOM juga berpartisipasi membuka booth.

Apoteker dituntut untuk lebih dinamis dan bergerak menjadi profesional yang berorientasi pasien dan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan pasien. Peran strategis tersebut mengharuskan apoteker untuk siap dan bersedia berbagi pengetahuan tentang terapi

obat yang optimal untuk pasien dengan fokus pada interaksi obat dan efek samping potensial, pengobatan berbagai kondisi medis tertentu, pendidikan dan promosi kesehatan umum masyarakat, serta informasi awal tentang perawatan darurat. Kesiapan ini tentu harus didukung dengan kompetensi yang senantiasa ditingkatkan untuk menjamin pelayanan yang lebih berkualitas dalam pencapaian setinggi-tingginya derajat kesehatan masyarakat. @

BADAN POM EDUKASI MASYARAKAT DI AREA CAR FREE DAY

Cuaca cerah di Jakarta pada Minggu (14/6/2015), melecut semangat Kepala Badan POM bersama para pegawai Badan POM untuk memberikan edukasi tentang Obat dan Makanan kepada masyarakat luas pengunjung area Car Free Day (CFD) di sekitar jalan Sudirman Jakarta.

Acara yang berpusat di kawasan bisnis terpadat di ibukota tersebut diawali dengan senam bersama yang dilanjutkan dengan dialog interaktif bersama Kepala Badan POM, Roy Sparringa dan Sekretaris Utama, Reri Indriani. Masyarakat

terlihat sangat antusias menyimak penjelasan dari Badan POM dan banyak mengajukan pertanyaan yang membuktikan keingintahuan mereka seputar Obat dan Makanan sangat tinggi.

Dalam kesempatan ini, Roy menjelaskan beberapa hal terkait pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Badan POM, terutama pengawasan jelang Ramadhan dan Idul Fitri. Beliau menghimbau agar masyarakat tenang dalam menjalankan ibadah puasa, karena Badan POM terus meningkatkan intensitas

pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia sejak 3 (tiga) minggu sebelum Ramadhan.

Masyarakat juga diimbau untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk khususnya pangan karena biasanya saat permintaan meningkat pada bulan Ramadhan banyak beredar produk ilegal, kadaluwarsa, dan rusak. "Ada tips sederhana yang harus diperhatikan dalam memilih produk yaitu KIK. Lihat kemasan apakah masih baik, periksa izin edarnya, dan cek tanggal kadaluwarsa," tutur Roy menjelaskan.

Di sela kegiatan ratusan pengunjung CFD membubuhkan tanda tangan disertai pesan dan harapan kepada Badan POM sebagai bentuk penggalan komitmen masyarakat Indonesia untuk selalu membaca label kemasan sebelum membeli. Penyebaran informasi terkait juga dipublikasikan melalui media sosial twitter dengan #bpomcfd. Kepala BPOM berpesan, jika masyarakat mencurigai suatu produk harap hubungi HALOBPOM 1500533 atau melalui twitter @bpom_ri. @

WARTA POM Penanggung Jawab: Sekretaris Utama Badan POM. Redaktur: Budi Djanu Purwanto, SH., MH. Editor: Dra. Nany Bodrorini, Apt; Sandhyani ED, S.Si., Apt; Nelly L Rachman, S.Sos. Desain Grafis: Dra. Sri Mulyani, Apt.; Yanuar Rahman, S.Ikom; Moch. Rahardi Putranto Sekretariat: Rika Kania, S.Si., Apt., MPP; Christina W. Zega, S.Sos.; Ristanti Kuntarsih, A.Md; Triswanto; Benny Robin, SE. Alamat Redaksi: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan POM RI Jl. Percetakan Negara No.23, Jakarta Pusat Telp. 021-4263333 Fax. 021-4209221 email: humasbpom@gmail.com Redaksi WARTA POM menerima tulisan dari luar. Bagi yang dimuat akan memperoleh souvenir menarik dari WARTA POM. Pertanyaan, komentar tanggapan, kritik dan saran mengenai isi WARTA POM dapat disampaikan ke redaksi melalui email: humasbpom@gmail.com atau Fax: 021-4209221



MADUGURUNHADI BLOGSPOT

Jangan Lupa !! Cek Kemasan, Izin edar dan Kedaluwarsa

Tingginya permintaan produk khususnya pangan jelang Ramadhan biasanya diikuti dengan maraknya peredaran pangan ilegal (tanpa izin edar/TIE) yang berisiko terhadap kesehatan.

Hal ini menjadi kewaspadaan bagi semua pihak, tak terkecuali pemerintah dalam hal ini Badan POM, yang melalui Balai Besar/Balai POM (BB/BPOM) seluruh Indonesia terus melakukan intensifikasi pengawasan jelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1436 H di sarana distribusi seperti toko, pasar tradisional, supermarket, hypermarket, serta para pembuat dan/atau penjual parsel.

Kepala Badan POM, Roy Sparringa telah menginstruksikan Kepala BB/BPOM di seluruh Indonesia untuk melakukan intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1436 H sejak 3 (tiga) minggu sebelum Ramadhan. Target pengawasan difokuskan pada pangan olahan TIE, kadaluwarsa, dan rusak (penyok, kaleng berkarat, dan lain-lain). Pengawasan juga dilakukan terhadap pangan berbuka puasa, kosmetika, dan obat tradisional impor/lokal ilegal dan/atau mengandung bahan dilarang/Bahan Kimia Obat (BKO), dengan fokus pemeriksaan di sarana importir/distributor/MLM/sarana distribusi lainnya.

Hasil pengawasan secara nasional sejak 25 Mei hingga 18 Juni 2015 menemukan 138.981 produk pangan tidak memenuhi ketentuan (TMK) yang terdiri dari 37.264 kemasan pangan ilegal/tanpa izin edar (TIE), 94.555 kemasan pangan rusak dengan nilai keekonomian temuan tsb diperkirakan mencapai lebih dari 5,5 miliar rupiah.

Sementara itu hasil temuan pangan TIE, pangan kadaluwarsa, dan pangan rusak selama tiga tahun terakhir cenderung meningkat dari tahun 2012 sebesar 67.471 kemasan, menjadi 163.850 kemasan pada 2013, dan 1.324.059 kemasan pada 2014. Total nilai keekonomian meningkat dari Rp 6.554.000.000,- menjadi Rp 52.962.360.000,-.

Berbagai upaya telah dilakukan Badan POM untuk meminimalkan peredaran pangan dan kosmetika yang tidak memenuhi syarat, antara lain melalui pengawasan yang lebih ketat di pintu masuk/perbatasan, pengawasan lebih difokuskan pada temuan besar ke hulu, penguatan peran pelaku usaha dalam

mengawasi produknya, penanganan produk sesuai cara ritel dan cara distribusi yang baik, serta pengawasan pangan dilaksanakan secara terpadu dan sinergis dengan lintas sektor di sepanjang rantai pasokan.

Namun demikian, upaya Badan POM ini tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan lintas sektor, pelaku usaha, dan masyarakat. Tanggung jawab bersama merupakan kunci keberhasilan dalam pengawasan Obat dan Makanan. Oleh karena itu, Badan POM selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Pertanian RI, Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Perindustrian RI, Kepolisian, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan sangat penting. Masyarakat diharapkan mampu menjadi konsumen cerdas yang teliti sebelum membeli/mengonsumsi Obat dan Makanan. "Ada tips sederhana untuk menjadi konsumen cerdas yaitu cek KIK (Kemasan, Izin edar, dan Kedaluwarsa)," tutur Roy menjelaskan. @

DAFTAR ISI



MADUGURUNHADI BLOGSPOT

COVER STORY.....HAL 1
Jangan Lupa !! Cek Kemasan, Izin edar dan Kedaluwarsa Serentak Mengawal Ramadhan 1436 H

OBAT DAN NAPZA.....HAL 4
Pilih yang Asli, Jangan yang Palsu

OTKOS & PRODUK KOMPLEMEN....HAL 5
Tebar Pesona Cantik dan Sehat Bersama Badan POM

PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA.....HAL 7



Serentak Bergerak Mengamankan Pangan di Desa (Gerakan Keamanan Pangan Desa)



KESEKTAMAAN.....HAL 11
Badan POM Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Badan POM Tak Henti Berantas Obat dan Makanan Ilegal



DETOXPEDIA.COM

SERENTAK MENGAWAL RAMADHAN 1436H

Sebagai unit pelaksana teknis di daerah, Balai Besar/Balai POM (BB/BPOM) di seluruh Indonesia terus meningkatkan pengawasan terhadap seluruh produk Obat dan Makanan yang beredar di lingkup wilayah tugasnya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BB/BPOM untuk meminimalkan peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat guna menciptakan rasa aman kepada konsumen saat menjalankan ibadah di bulan Ramadhan.

Mulai dari Barat Indonesia, BBPOM di Aceh pada awal Juni 2015 bersama Dinas Kesehatan, Disperindag, Satpol PP, dan Kepolisian menggelar sidak di pasar-pasar tradisional Kota Banda Aceh dan Kab Aceh Besar. Dalam operasi intensifikasi pengawasan pangan dan kosmetika tersebut, dari 13 sampel mi yang diuji menggunakan *Rapid Test Kit*, terdapat 11 sampel mi teridentifikasi menggunakan formalin maupun boraks, yang langsung ditindaklanjuti tim dengan mengamankan 300 kg mi berformalin dan boraks, serta 115 liter formalin.

Berlanjut ke Pulau Jawa, BBPOM di Jakarta pada 17 Juni 2015 menggerebek sebuah gudang di Komplek Pergudangan Elang Laut Blok I Daerah Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara, yang menyimpan pangan olahan impor ilegal. Dari tempat kejadian berhasil disita 7.762 kemasan pangan ilegal dan 96 kemasan kosmetika ilegal dengan nilai keekonomian lebih dari 500 juta rupiah. Temuan pangan dan kosmetika ilegal tersebut merupakan

produk untuk bayi yang dijual secara online antara lain sereal, makanan bayi siap santap, biskuit dan *snack*, serta sabun dan shampoo. Selain itu, BBPOM di Jakarta juga menggelar pengawasan makanan takjil di dua pasar berbeda di Jakarta Timur yaitu Pasar Cibubur dan Pasar Ciracas. Dari 40 sampel yang diambil dinyatakan 10 sampel mengandung formalin, boraks, dan rhodamin B.

Intensifikasi pengawasan pangan serupa juga dilakukan oleh BBPOM di Bandung bersama Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dinas KUKM, Perindag Kota Bandung, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung pada 16-17 Juni 2015. Dalam pemeriksaan di *supermarket* ditemukan 46 item (503 kemasan) produk impor TIE dan tidak memenuhi ketentuan label serta tidak berbahasa Indonesia senilai hampir 30 juta rupiah. Dari hasil pengembangan 19 Juni 2015, berhasil diamankan 19.130 kemasan pangan impor ilegal yang akan diedarkan melalui *online* dan retail (*supermarket*) senilai Rp731.020.000,- dimana sebagian besar produk merupakan produk asal Korea, Jepang, Australia, Tiongkok, Swiss, dan USA.

BBPOM di Semarang bersama Biro Bina Mitra POLDA Jawa Tengah (Jateng), Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan Propinsi Jateng, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jateng, Dinas Kesehatan Kota Semarang, dan LP2K telah melaksanakan intensifikasi pengawasan pangan tahap pertama pada 16 Juni 2015 di 3 pasar tradisional, 2 swalayan, dan 1 *hypermarket*. Hasil pengawasan ditemukan mi berformalin sebanyak + 64 kg, 130 kemasan obat tradisional mengandung

bahan kimia obat (BKO), serta 44 item makanan kedaluwarsa.

Pangan berformalin juga ditemukan di Yogyakarta saat BBPOM di Yogyakarta bersama Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah DIY pada 9-11 Juni 2015 melakukan pengawasan pangan jajanan di 5 pasar tradisional di 5 kabupaten/kota yaitu pasar Beringharjo, pasar Wates, pasar Bantul, pasar Argosari, dan pasar Prambanan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari 52 sampel yang diperiksa sebanyak 33 sampel memenuhi syarat (MS) dan 19 sampel tidak memenuhi syarat (TMS) karena mengandung Rhodamin B pada kerupuk, lanting, bolu empit, koyah, dan es dawet merah; borak pada bleng; serta formalin pada mi goreng.

Sementara itu hasil intensifikasi pengawasan pangan di sarana gudang dan sarana distribusi pangan yang dilakukan BBPOM di Surabaya pada 12 Juni 2015, ditemukan 42 kemasan pangan TIE dan 1.585 kemasan pangan kedaluwarsa dengan perkiraan total nilai keekonomian lebih dari 29 juta rupiah. Tak sampai di situ, BBPOM di Surabaya dalam Kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (TPBB) pada 16 Juni 2015 menemukan 19.484 kemasan kosmetika ilegal dengan nilai keekonomian Rp313.838.000,- dan 2.498 kemasan pangan ilegal senilai Rp40.996.650,-. Dari hasil temuan pangan kedaluwarsa tersebut telah dilakukan pemusnahan sejumlah 1.544 kemasan.

Bergeser ke Indonesia Tengah, BPOM di Kupang melalui Pos POM Ende telah melaksanakan 3 tahap pengawasan di sejumlah sarana distribusi pangan, kosmetika (termasuk 2 salon), dan obat tradisional pada awal Juni 2015 di kabupaten Ende, Nagekeo, dan Sikka. Hasil pengawasan ditemukan 609 kemasan pangan kedaluwarsa, 123 kemasan obat tradisional, 370 kemasan kosmetika kedaluwarsa, serta 211 kemasan kosmetika TIE dengan total nilai keekonomian mencapai Rp14.227.000.

Di Sulawesi, intensifikasi pengawasan pangan dilakukan BPOM di Kendari terhadap pangan jajanan buka puasa dengan menggunakan Mobil Laboratorium Keliling. Bertempat di Jalan Sao-Sao, Tim BPOM di Kendari melakukan sampling dan pengujian kandungan formalin, boraks, dan pewarna tekstil, dan hasilnya bahwa seluruh sampel tidak mengandung bahan

berbahaya sehingga memenuhi syarat untuk dikonsumsi.

Intensifikasi pengawasan serupa dilakukan BPOM di Palu pada 18 Juni 2015 bertempat di Pasar Ramadhan yang terletak di lapangan Vatulemo, alun-alun Kantor Walikota Palu dan Pasar Tua Kota Palu. Dalam rangka memastikan pangan buka puasa yang dijual aman dari penyalahgunaan bahan berbahaya, BPOM di Palu bersama Dinas Kesehatan Kota Palu melakukan pengambilan sampel pangan. Masyarakat terlihat antusias untuk mengetahui hasil pengujian yang dilakukan menggunakan mobil laboratorium keliling.

Di Sulawesi Utara, BBPOM di Manado bersama Dinkes Prov. Sulut, Disperindag Prov Sulut, BKP Prov Sulut, DKP Prov. Sulut, Bank Indonesia di Sulawesi Utara, Biro Ekonomi Prov. Sulut, dan instansi/ stakeholder terkait pada 17 Juni 2015 melakukan intensifikasi pengawasan pangan sekaligus memantau harga bahan pokok dan ketersediaan pangan serta bahan bakar menyambut bulan suci Ramadhan. Sidak dilakukan ke wilayah pasar, beberapa swalayan, beberapa gudang pangan/sembako, beberapa SPBU, dan juga agen gas LPG. Beberapa sampel yang diuji di mobil laboratorium keliling seperti produk daging dan pangan dalam kemasan, tidak dijumpai mengandung bahan berbahaya. Hasil dari sidak tersebut didapati bahwa pangan yang beredar aman, ketersediaan pangan mencukupi, belum terjadi kenaikan harga bahan pokok yang signifikan, dan bahan bakar tersedia dalam jumlah yang memadai. Wagub menghimbau pelaku usaha tidak memajang dan menjual produk kedaluwarsa agar tidak merugikan masyarakat.

Masih di Sulawesi, Tim Gabungan BPOM di Gorontalo, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, UMKM Kota Gorontalo, dan Pemerintah Kota Gorontalo pada 17 Juni 2015 melakukan inspeksi ke sejumlah supermarket, toko, dan pasar tradisional di Kota Gorontalo. Hasil pengawasan pangan olahan secara terpadu menunjukkan masih ditemukannya produk pangan kedaluwarsa dan rusak. Kemudian dilakukan tindak lanjut berupa pembinaan kepada pemilik sarana distribusi. Selain melakukan inspeksi, BPOM di Gorontalo juga melaksanakan pengujian cepat terhadap produk pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya. Hasil uji menunjukkan tidak

ditemukannya cemaran bahan berbahaya (formalin, boraks, rhodamin B, dan methanil yellow).

Di ujung Timur Indonesia, BPOM di Manokwari tergabung dalam tim pengawas 9 bahan pokok bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (DisperindagKop) Kabupaten Manokwari. Pengawasan Bahan Pokok sangat penting mengingat saat bulan puasa disinyalir terjadi penyimpangan oleh pelaku usaha dengan menjual produk TIE, kedaluwarsa, dan rusak. BPOM di Manokwari telah melakukan intensifikasi pengawasan terhadap pangan dan kosmetika sejak dua minggu menjelang puasa. Kepala BPOM di Manokwari, Bosar Pardede menghimbau pelaku usaha untuk tidak mendistribusikan produk-produk kadaluwarsa ke daerah perifer yang masih rendah kesadaran masyarakatnya dalam memahami produk yang tidak layak dan kedaluwarsa.

Pengawasan terhadap bahan pokok ini akan dilakukan bersama dengan berbagai lintas sektor yaitu Balai POM di Manokwari, Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Polda Papua Barat, Polres Kab Manokwari, dan TNI Angkatan Laut yang terbentuk dalam Tim Pengawas Bahan Pokok. Pelaku usaha juga diminta oleh Wakil Bupati untuk menyampaikan stok bahan pokok agar tidak terjadi kekosongan selama Bulan Puasa dan Idul Fitri 1436 H. Hasil rapat ini akan ditindaklanjuti dengan pengawasan di lapangan pada 12 Juni 2015 yang selanjutnya selama bulan puasa akan dilakukan pengawasan minimal 3 (tiga) kali.

Diharapkan dengan kegiatan intensifikasi pengawasan bersama lintas sektor akan terus mendorong peningkatan kerja sama strategis terkait pengawasan Obat dan Makanan antar instansi terkait terutama di daerah. Selain itu partisipasi aktif pelaku usaha dan masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung optimalisasi pengawasan Obat dan Makanan. Pelaku usaha dihimbau untuk mematuhi peraturan yang berlaku dengan tidak mengedarkan produk TIE, produk rusak, produk kedaluwarsa, dan mengandung bahan berbahaya.

Masyarakat sebagai konsumen dihimbau untuk lebih teliti dan cermat dengan mengecek kemasan, izin edar, dan kedaluwarsa agar terhindar dari produk yang berisiko terhadap kesehatan. Satu tindakan untuk masa depan, Cek "KIK".@

OPERASI PANGEA VIII BIDIK OBAT PALSU

"Jual obat aborsi/obat penggugur kandungan aman dan ampuh, 08564071444"

"Obat aborsi aman terpercaya: Obat aborsi aman tanpa kuret & efek samping"

"Anda Sedang Mempunyai Masalah Dengan Kehamilan Yang Tidak Anda Inginkan?? Anda Juga Ingin Menggugurkan Kehamilan Anda? Jangan Cemas Lagi, Solusinya Yang Tepat Hanya Dengan Obat Aborsi 100% Aman Manjur. Disinilah Tempatnya!!!"

Akhir-akhir ini kita sering melihat dan membaca iklan dan promosi tentang obat aborsi seperti diatas di beberapa media sosial dan situs website tertentu. Berdasarkan penelusuran Badan POM, obat-obat tersebut digunakan secara *off label* (penggunaan obat di luar indikasi yang disetujui oleh Badan POM). Iklan dan promosi di situs website menjadi perhatian Badan POM. Pasalnya, produk yang dijual secara *online* seperti ini seringkali tidak jelas sumbernya, sehingga tidak dapat dijamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutunya

Peredaran produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan ilegal secara *online* yang semakin marak seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan pemanfaatan internet, merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Karena itu, dalam rangka melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan khususnya terhadap perdagangan ilegal Obat melalui media internet, Badan POM bekerja sama dengan lintas sektor terkait dalam kerangka Satuan

Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal. Salah satu operasi khusus yang dilakukan adalah Operasi Pangea.

Operasi PANGEA merupakan operasi internasional yang dilakukan di bawah koordinasi INTERPOL, melibatkan partisipasi aktif Negara anggota INTERPOL dengan fokus pelaksanaan memutus sistem distribusi obat ilegal melalui media internet berupa deteksi infrastruktur internet, sistem pembayaran elektronik dan tata cara pengiriman barang. Badan POM telah aktif bergabung sejak Operasi Pangea IV tahun 2011, dan tahun 2015 Badan POM ditunjuk sebagai *National Coordinator* pelaksanaan Operasi Pangea VIII yang diikuti oleh 115 negara di seluruh dunia dan berkoordinasi dengan International Criminal Police Organization (ICPO) – Interpol. Target operasi Pangea adalah penjualan produk obat ilegal termasuk obat palsu yang dipasarkan secara *online*. Tahun 2015 ini, juga mempunyai target prioritas khusus yaitu alat kesehatan ilegal termasuk palsu.

Kamis, 25 Juni 2015 Badan POM menggelar konferensi pers untuk menginformasikan hasil pelaksanaan Operasi Pangea VIII yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan RI, NCB Interpol Indonesia, Kementerian Perdagangan RI, serta Bareskrim Mabes POLRI. "Selama sepekan operasi Pangea VIII, 9 – 16 Juni 2015, sebanyak 293 situs internet teridentifikasi menjual obat dan alat kesehatan ilegal dengan rincian 216 situs internet menjual obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetika ilegal termasuk

palsu, 26 situs internet menjual obat yang disalahgunakan sebagai penggugur kandungan, dan 51 situs internet menjual alat kesehatan (lensa kontak) ilegal", jelas Kepala BPOM, Roy Sparringa. "Perolehan hasil sitaan berjumlah lebih dari 3,4 juta kemasan produk dengan nilai keekonomian mencapai 27,6 milyar rupiah", lanjut Roy. Keseluruhan temuan hasil operasi ini masih disimpan untuk ditindaklanjuti secara pro-justitia.

Di samping temuan produk, petugas juga berhasil menemukan sebuah gudang penyimpanan penuh dengan kemasan kosong obat yang siap dijadikan bahan pembuatan obat palsu. "Modus aksi pelaku peredaran obat ilegal saat ini didominasi oleh tindakan mengubah tanggal kedaluwarsa produk-produk yang telah melewati masa *expired date* dan mengubah kandungan atau jumlah zat aktif dalam produk tersebut", imbu Roy.

Tindakan peredaran Obat dan Makanan ilegal secara *online* tentunya sangat membahayakan kesehatan masyarakat. Untuk itu, Badan POM berkomitmen untuk terus berperan aktif dan berkoordinasi secara lebih intensif bersama pihak terkait dalam rangka pengawasan produk-produk Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia, tidak terkecuali produk yang beredar secara *online*. Masyarakat dihimbau agar meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah tergiur pada iklan penawaran berbagai macam produk obat, obat tradisional, kosmetika, ataupun suplemen kesehatan yang banyak beredar di dunia maya. @

PILIH YANG ASLI, JANGAN YANG PALSU

Memperingati World Anti-Counterfeiting Day 2015, 1 Juni 2015, Badan POM menggelar beberapa kegiatan antara lain Sosialisasi Cara distribusi Obat yang Baik kepada Apoteker dan Pemilik Sarana Apotek di kawasan Jatinegara dan Pasar Pramuka serta Peresmian Forum *Single Point of Contact* (SPOC). Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari kemungkinan risiko kesehatan yang timbul akibat konsumsi produk ilegal dan/ atau palsu. Menurut data Badan POM, praktek pemalsuan obat dapat terjadi pada merek dan produk obat paten maupun generik dengan berbagai kriteria pemalsuan, yang dapat menyebabkan memburuknya kesehatan pasien dan meningkatnya biaya pengobatan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan POM,



Roy Sparringa melakukan aksi simpatik dengan memberikan bunga mawar asli kepada pengguna jalan yang melintas di depan kantor Badan POM. Pemberian bunga asli ini sebagai simbol bahwa masyarakat harus memilih produk obat yang asli, bukan yang palsu, walaupun yang palsu lebih indah.

Dalam sambutannya pada acara yang dihadiri oleh GP Farmasi dan IPMG ini, Kepala Badan POM mengingatkan agar masyarakat selalu membeli obat di sarana pelayanan kesehatan berizin dan menghindari pembelian obat secara *online* karena tidak diketahui kepastian asal-usul obat yang dijual tersebut. @



TEBAR PESONA CANTIK DAN SEHAT BERSAMA BADAN POM

Memiliki penampilan cantik menjadi impian sebagian besar wanita, terutama untuk bagian wajah. Tak heran jika banyak kaum hawa rela melakukan apa saja demi menjaga penampilan cantik mereka, termasuk jika harus mengeluarkan biaya mahal untuk membeli kosmetika demi mendapatkan penampilan yang lebih sempurna. Namun seringkali, keinginan tidak sesuai kenyataan, yang semula ingin cantik bisa jadi penyakit jika tidak hati-hati dalam memilih kosmetika yang aman.

Hal inilah yang melatarbelakangi Balai Besar POM (BBPOM) di Samarinda untuk menggelar "Aksi Tebar Pesona Cantik dan Sehat Bersama POM". Pertama kali digelar pada 29 April 2015, aksi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat cara memilih kosmetika yang baik agar terhindar dari kosmetika yang mengandung bahan berbahaya. Dalam aksi yang menggunakan mobil laboratorium keliling tersebut, BBPOM di Samarinda melakukan penggalangan dukungan untuk meningkatkan

pengetahuan tentang kosmetika agar tampil cantik.

Sukses digelar akhir april 2015, aksi "Tebar Pesona Cantik dan Sehat Bersama POM" berangkat menuju SMAN 5 dan SMAN 1 Samarinda pada 6 Mei 2015. Para siswa/siswi mendapatkan informasi langsung terkait kosmetika tanpa izin edar/ilegal serta kosmetika yang dilarang digunakan karena mengandung bahan berbahaya. Para siswa/siswi ini menjadi target sasaran aksi karena penggunaan

kosmetika dewasa ini bukan hanya dari kalangan orang dewasa saja melainkan juga merambah pada anak usia remaja atau usia sekolah.

Berturut-turut pada 13 Mei 2015, 22 Mei 2015, dan 1 Juni 2015, mobil laboratorium keliling BBPOM di Samarinda kembali menggelar aksi "Tebar Pesona Cantik dan Sehat bersama POM" di SMAN 2 Samarinda, SMK Negeri 1 Samarinda, Pasar Segiri Samarinda, Poltekes Samarinda, serta Pasar Pagi Samarinda. Para siswa/siswi serta masyarakat umum yang menjadi target sasaran aksi ini diharapkan dapat membantu menyebarkan informasi terkait tips memilih kosmetika, baik kepada sesama pelajar, orang terdekat, keluarga, tetangga, bahkan masyarakat secara luas.

Harapan masyarakat agar kegiatan aksi seperti ini dapat terus dilaksanakan dan bukan hanya dengan aksi kegiatan sosialisasi seputar kosmetika saja melainkan informasi-informasi tentang obat, obat tradisional, dan pangan.

DORONG PEMENUHAN CARA PRODUKSI KOSMETIKA DAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK

Denah bangunan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh industri obat tradisional dan kosmetika sesuai Permenkes 006 tahun 2013 tentang Izin Usaha Obat Tradisional dan Permenkes 1175 tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika. Terkait hal tersebut, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen Badan POM bersama Balai Besar POM di Surabaya mengadakan kegiatan pelayanan publik tentang Denah Bangunan Sarana Produksi Kosmetika dan Obat Tradisional di Surabaya pada 28 - 30 April 2015.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Balai Besar POM di Surabaya, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa tersebut dihadiri oleh 50 orang pemilik/penganggung jawab Industri/Usaha Kecil Obat Tradisional dan Industri Kosmetika di Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, peserta memperoleh *overview* tentang (1) cara produksi obat tradisional yang baik (CPOTB), (2) aspek produksi obat tradisional dan kosmetika, (3) kondisi industri obat tradisional dan kosmetika di wilayah Jawa Timur, dan (4) program pengawasan obat tradisional dan kosmetika.

Selama kegiatan berlangsung, setiap peserta diberikan kesempatan berkonsultasi tentang

segala permasalahan yang dihadapi dalam menerapkan cara produksi yang baik, denah bangunan agar sesuai dengan prinsip CPOTB/CPKB, serta mempermudah dalam pemenuhan persyaratan dalam pembuatan izin produksi obat tradisional atau kosmetika.

Setelah dilakukan konsultasi denah bangunan dan sistem tata udara selama tiga hari tersebut, terdapat 37 (tiga puluh tujuh) denah UKOT, 3 (tiga) Rencana Induk Pembangunan (RIP) IOT, 2 (dua) Rancangan Sistem Tata Udara IOT, dan 5 (lima) denah industri kosmetika yang disetujui oleh Badan POM. @

5 LANGKAH CERDAS MEMILIH KOSMETIKA BERSAMA CANTIK HIJABERS DAN IWAPI

Hijabers Kota Kendari mengikuti kegiatan *beauty class* yang dilaksanakan oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara dalam acara *Beauty Hijabi*, Sabtu, 2 Mei 2015 di Hotel Plaza Inn Kendari.

Wanita-wanita cantik yang berhijab (berjilbab/berkerudung) tidak lepas dari pemakaian kosmetika, baik sebagai perawatan maupun sebagai tata rias untuk menunjang penampilan. Namun demikian kosmetika yang digunakan tentunya diharapkan adalah



BPOM

kosmetika yang aman dan telah memenuhi persyaratan, dalam hal ini sudah ternotifikasi di Badan POM.

Pada acara yang dihadiri juga oleh Ibu Gubernur Sulawesi Tenggara, Tina Nur Alam, kepala Balai POM di Kendari, Adilah Pababbari mendapat kesempatan untuk mengedukasi wanita-wanita cantik *Hijabers* tentang 5 Langkah Cerdas Memilih Kosmetika. "Lebih bijaksana dan berhati-hatilah memilih kosmetika, baca label sebelum membeli, jangan sampai menggunakan kosmetika yang berbahaya". Demikian pesan Tina kepada seluruh peserta *beauty class*. @

GEREBEK GUDANG KOSMETIKA ILEGAL DI JEMBER

Balai Besar POM (BBPOM) di Surabaya melakukan pemeriksaan di gudang kosmetika ilegal di Kabupaten Jember Jawa Timur. Dalam kegiatan yang digelar 28 Mei 2015, tim pemeriksa BBPOM di Surabaya yang didukung oleh petugas Direktorat Reskoba Polda Jawa Timur menemukan kosmetika tanpa izin edar sebanyak 28 (dua puluh delapan) item. Temuan sebanyak 11.900 (sebelas ribu sembilan ratus) *pieces* tersebut bernilai puluhan juta rupiah.

Pemilik gudang toko "SG" tersebut dengan sengaja menyembunyikan produk kosmetika ilegal di bawah rak-rak tempat kosmetika terdaftar. Namun berkat kejelian petugas, akhirnya kosmetika ilegal dapat diamankan. Temuan terhadap toko "SG" ini merupakan hasil penelusuran dari penertiban produk ilegal



di wilayah Banyuwangi, Situbondo, dan Jember. Selanjutnya dilakukan investigasi oleh Petugas sehingga dapat ditemukan alamat gudang dimaksud.

Terhadap temuan tersebut kemudian



BPOM

dilakukan penyitaan, pemilik gudang selanjutnya diminta keterangan untuk penelusuran dan pengembangan kasus lebih lanjut. Petugas akan memproses kasus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. @

GERAKAN KEAMANAN PANGAN DESA: BERGERAK MENGAMANKAN PANGAN DI DESA



BPOM

"Permasalahan keamanan pangan atau potensi risiko dapat terjadi di setiap mata rantai pangan, sehingga upaya agar pangan tetap aman, bermutu, dan bergizi hendaknya dilakukan secara komprehensif dan terus menerus. Pembangunan keamanan pangan dapat dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat.

Oleh karena itu, perlu ada upaya yang menyentuh strata ini sehingga pangan yang aman, bermutu, dan bergizi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia", demikian penggalan sambutan Kepala Balai Besar POM (BBPOM) di Yogyakarta, I Gusti Ayu Adhi Anyapatni, pada pembukaan Bimbingan Teknis (bimtek) Kader Keamanan Pangan sebagai salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat desa dan usaha pangan desa di bidang keamanan pangan dalam program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) tanggal 4-5 Mei 2015 di aula BBPOM di

Yogyakarta.

Program nasional GKPD yang dicanangkan 5 Februari 2014 telah memasuki tahun ke-dua. Beragam kegiatan dilaksanakan Balai Besar/ Balai POM (BB/BPOM) di seluruh Indonesia untuk menyukseskan program ini, salah satunya adalah *gap assesment* yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan penerapan komunitas masyarakat di wilayah tersebut terhadap prinsip-prinsip keamanan pangan, kemudian kegiatan advokasi kelembagaan desa dengan tujuan untuk mempermudah dan memperlancar koordinasi

antara BBPOM/BPOM dengan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan GKPD tahap selanjutnya, serta kegiatan bimbingan teknis sebagai pembekalan kepada Kader Keamanan Pangan Desa sebagai tenaga pengawas dalam GKPD.

Sebagai contoh, pada 26-27 Mei 2015 BBPOM di Denpasar melaksanakan bimtek Kader Keamanan Pangan di Kabupaten Klungkung yang tiga desanya akan diintervensi tahun 2015 ini. Bimtek diikuti oleh 45 orang kader dari tiga Desa, yaitu Desa Takmung, Desa Kamasan, dan Desa Kusamba yang mewakili kader PKK, Karang Taruna, Guru, dan Tim Keamanan Pangan Desa. Pada bimtek ini, peserta memperoleh materi mengenai 5 Kunci Keamanan Pangan untuk anak sekolah, keluarga, ritel, pedagang siap saji, industri rumah tangga pangan (IRTP), dan terakhir dilanjutkan dengan simulasi penggunaan Rapid Test Kit dan simulasi penyuluhan oleh kader Keamanan Pangan.

Bimtek serupa juga dilaksanakan oleh BBPOM di Jayapura pada Mei 2015 dengan peserta kader keamanan pangan berasal dari kelompok PKK, Karang Taruna, Guru, dan Petugas Kesehatan Lingkungan/Penyuluh Puskesmas dari tiga desa yaitu Kelurahan Hamadi Kota Jayapura serta Kampung Asyaman dan Kampung Yuwanain Kabupaten Keerom. Sementara pada 25 Mei 2015, BBPOM di Banda Aceh menyelenggarakan bimtek kepada Komunitas Desa Kelompok PKK.

Kegiatan dilaksanakan di Aula Kecamatan Lueng Bata. Peserta kegiatan berasal dari 3 Gampong dan 3 kecamatan, yaitu Gampong Lamteah Kecamatan Ulee Kareng, Gampong Pantee Kecamatan Ingin Jaya, dan Gampong Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata.

Kepada para kader ditekankan bahwa keamanan pangan harus dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah dan

masyarakat agar pangan yang aman, bermutu, dan bergizi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat secara luas. Masyarakat harus diberdayakan agar mampu secara mandiri menjaga keamanan pangan di lingkungannya masing-masing. Diharapkan para kader yang telah dilatih dapat menjadi fasilitator di setiap Desa untuk melihat adanya potensi risiko keamanan pangan yang dapat terjadi di setiap mata rantai pangan dan tatanan kehidupan masyarakat. @

UMKM INDONESIA, KITA PASTI BISA!

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam perekonomian nasional mengingat banyaknya jumlah skala industri ini di Indonesia termasuk usaha yang bergerak di bidang pangan. Namun potensi ini belum diimbangi dengan pengetahuan yang memadai terlihat dari masih dijumpainya penyimpangan yang terjadi pada produk pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan (IRTP), diantaranya ketidaktahuan pemakaian bahan tambahan pangan (BTP), kurang pemahannya pengetahuan tentang label, masih digunakannya bahan berbahaya dalam pangan, dan sebagainya.

Karena itu diperlukan pendekatan kepada pelaku usaha untuk memperkecil penyimpangan yang masih terjadi, terlebih dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 ini, UMKM perlu diperkuat terutama terkait pemenuhan standar keamanan dan mutu produk pangan. Badan POM turut berperan aktif dalam perkuatan industri pangan UMKM melalui program peningkatan keamanan dan mutu produk pangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka harmonisasi Asean 2015. Program ini meliputi kajian kesenjangan dan intervensi kemampuan UMKM terhadap harmonisasi Asean 2015 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) tahap yaitu (1) penyusunan *baseline* profil dan kemampuan UMKM dalam bentuk kajian/survei kesenjangan



UMKM, (2) grading sarana produksi UMKM, (3) penyusunan database, (4) intervensi melalui bimbingan teknis, sosialisasi dan edukasi, dan (5) monitoring dan evaluasi. Selama Mei-Juni 2015 ini, BBPOM/BPOM di seluruh Indonesia secara berkesinambungan melakukan sosialisasi, edukasi, dan bimbingan teknis (bimtek) kepada UMKM.

12 Mei 2015, BBPOM di Bandung bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka melaksanakan kegiatan sosialisasi cara produksi pangan yang baik industri rumah tangga (CPPB-IRT) yang

diikuti oleh 30 peserta pemilik industri rumah tangga yang berasal dari 8 kecamatan. Peserta sosialisasi mendapat materi tentang penerapan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga (CPPB-IRT) serta merencanakan dan menerapkan audit internal industri rumah tangga pangan. Selain itu juga disampaikan materi pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan bahan tambahan pangan.

Selanjutnya, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, BBPOM di Bandung

menyelenggarakan kegiatan “Bimbingan Teknis Implementasi Standar Mutu dan Keamanan Pangan” dan “Bimbingan Teknis Implementasi CPPOB/GMP dan Sistem Jaminan Halal Untuk Peningkatan Daya Saing UMKM Pangan Olahan Dalam Rangka Menghadapi MEA” yang diikuti oleh 40 peserta pemilik industri rumah tangga yang telah memiliki nomor SP atau PIRT pada 12-13 Mei 2015. Kegiatan bimtek ini juga dilaksanakan BPOM di Serang pada 26 Mei 2015 yang diikuti oleh 40 peserta pemilik industri rumah tangga, Dinas Kesehatan Kota Tangerang, serta Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Tangerang.

BPOM di Ambon tidak mau ketinggalan. Bertempat di aula kantor pusat layanan usaha terpadu KUMKM Dinas Koperasi Provinsi Maluku, 13 Mei 2015 dilaksanakan kegiatan bimtek pengembangan usaha yang menyampaikan materi cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga, prosedur untuk mendapatkan SPP-IRT dan tata cara pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga.

Sementara BBPOM di Surabaya melakukan Bimtek UMKM di Kabupaten Tuban dengan peserta 30 IRTP yang telah dilakukan pembinaan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban. Materi yang disampaikan meliputi apa dan bagaimana pasar bebas Asean, label, sertifikasi halal, pendaftaran pangan olahan, cara produksi

pangan olahan yang baik, kemasan pangan, dan surat persetujuan ekspor.

Kegiatan sosialisasi keamanan pangan bagi IRTP juga dilaksanakan BBPOM di Banda Aceh pada 18-19 Mei 2015 di kota Lhokseumawe. Bertujuan untuk melatih pelaku usaha tentang

cara produksi pangan yang baik industri rumah tangga (CPPB-IRT), kegiatan ini diikuti oleh 50 orang terdiri pemilik usaha IRTP dari berbagai jenis produk yang dihasilkan, diantaranya dari usaha ikan bandeng presto, kripik, roti, abon ikan, kue kering dan lain sebagainya. Antusias

dari peserta yang hadir dalam kegiatan ini sangat tinggi terlihat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Harapan dari kegiatan ini agar pelaku usaha dapat memproduksi pangan yang aman dari bahan berbahaya dan bermutu sehingga masyarakat dapat terlindungi. @

SATGAS PENGAWAS BAHAN BERBAHAYA DI BANTEN BERAKSI

Tim gabungan Badan POM dan Balai POM di Serang beserta Dinas Perindag Provinsi Banten, Dinas Perindag Kota Tangerang, Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dan Polda Metro Jaya melakukan inspeksi bersama di sebuah toko kimia di wilayah Tangerang, 12 Mei 2015.

Dari hasil inspeksi ditemukan 100 kg boraks dan 135 liter formalin cair yang sudah dikemas dalam jerigen 5 liter siap edar. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa sarana tidak memiliki izin distributor



bahan berbahaya. Produk-produk bahan berbahaya ilegal tersebut akhirnya diserahkan kepada petugas untuk dimusnahkan.

Sarana distribusi pun dihimbau untuk melengkapi izin distributor bahan berbahaya. Kegiatan inspeksi terpadu ini

merupakan implementasi surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pengawasan terpadu bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan yang tindak lanjutnya adalah pembentukan tim pengawas terpadu di daerah. Tim ini bertugas melakukan inspeksi terhadap pengadaan, peredaran, dan penggunaan bahan berbahaya baik di sarana produksi, importasi, distribusi, pengecer, maupun pengguna akhir bahan berbahaya. @

KONSUMEN CERDAS, KEAMANAN PANGAN MENINGKAT

“Seminar ini penting karena memberikan kesempatan untuk belajar dan mendapatkan gambaran perilaku dan persepsi konsumen terkini mengenai keamanan pangan. Masyarakat sebagai konsumen memiliki peran yang sangat penting”. Demikian disampaikan Kepala Badan POM, Roy Sparringa dalam sambutannya pada pembukaan *Seminar on Understanding Consumer Science and Behaviour* oleh ILSI SEA Region di Hotel Pullman – Jakarta, 11 Mei 2015.

Dalam sambutannya, Roy menekankan pentingnya keamanan pangan yang saat ini menjadi perhatian publik. Globalisasi perdagangan makanan berkontribusi terhadap dinamika pola sistem keamanan pangan. Transportasi, komunikasi, dan teknologi informasi modern memungkinkan pendistribusian pangan antar negara-negara di seluruh dunia. Modernitas ini menawarkan banyak pilihan



kepada konsumen dengan menyediakan lebih banyak jenis makanan dari produksi domestik maupun internasional. Namun demikian, kondisi ini juga membuat kemungkinan masalah keamanan pangan. Tantangan utama dalam keamanan pangan termasuk *Food Borne Disease (FBD) outbreaks caused by unsafe food*, penyalahgunaan bahan kimia berbahaya yang dilarang untuk makanan, dan melebihi batas maksimum kontaminasi dan aditif makanan.

Seminar ini dihadiri oleh Kepala Badan POM, Roy Sparringa; Direktur Eksekutif ILSI SEA Region Singapura, Boon Yee Yeong; penasihat ILSI, Prof. Deddy Fardiaz; ILSI SEAR, Prof. Aman Wirakartakusumah; New Castle University UK, Prof. Lynn Frewer; Standar Makanan Australia Selandia Baru Australia, Hazel Fowler; New Castle University Singapore, Karin Tan; SEAFST Pusat, Prof. Purwiyatno Hariyadi; Institut Pertanian Bogor, Prof. Ujang Sumarwan; dan Institut Pertanian

Bogor, Dr. Megawati Simanjuntak. *“I would like to extend my appreciation to ILSI SEA Region for the facilitation to hold this workshop and invite competent and experienced experts in risk communication. I am in great hope that your attendance here will be very useful to strengthen your capacity in providing understanding on consumer behavior. I expect that this event will be successful and fruitful”*, demikian disampaikan Kepala Badan POM saat menutup sambutannya. @

BERAS PLASTIK? TENANG & JANGAN PANIK !!

Presiden RI, Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama dengan KaPOLRI, Jenderal Pol Badrodin Haiti; Menteri Perdagangan RI, Rachmat Gobel; Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman; Kepala Badan POM Roy Sparringa; dan Kepala Badan Intelijen Negara, Marciano Norman di Istana Negara, Selasa, (26/5/2015). Salah satu materi yang dibahas dalam rapat tersebut adalah hasil pengujian terhadap sampel beras yang diduga mengandung plastik.

"Kami telah menguji sampel beras yang diduga mengandung plastik di beberapa laboratorium milik pemerintah, yaitu Badan POM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan laboratorium forensik milik POLRI. Hasil pengujian tersebut menunjukkan tidak ada unsur plastik dalam sampel beras atau negatif mengandung bahan plastik". Demikian pernyataan Badrodin kepada seluruh media yang hadir dalam konferensi yang diselenggarakan usai rapat.

Badan POM sebagai *Emergency Contact*



Point dari International Food Safety Authorities Network (INFOSAN) di bawah WHO, belum lama ini menanyakan kepada INFOSAN apakah pernah ada kasus serupa yang dilaporkan. "Tidak pernah ada kasus serupa", merupakan jawaban yang diberikan INFOSAN. "Masyarakat diharapkan tenang terkait permasalahan beras ini", ujar Roy. "Pemerintah berkomitmen untuk terus melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi persyaratan", lanjutnya.

"Badan POM juga telah mengintruksikan kepada jajaran Balai Besar/Balai POM di seluruh

Indonesia terus bekerja sama dengan lintas sektor dan dinas-dinas terkait untuk mengawal kasus ini dan siap menguji jika ada produk beras yang diduga tidak memenuhi ketentuan, namun sejauh ini tidak ada yang melaporkan", lanjut Roy.

Badan POM kembali mengajak masyarakat untuk lebih cerdas dan teliti memilih makanan yang akan dikonsumsi. Apabila masih ada keraguan bisa langsung menghubungi Contact Center HALO BPOM 1500533 atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) di Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia. @

BADAN POM HIMBAU MASYARAKAT AGAR TIDAK KHAWATIR

Hasil uji beras yang diduga mengandung plastik sudah diumumkan. Badan POM, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Pertanian RI, dan POLRI telah menguji beberapa sampel beras yang diduga mengandung plastik dan hasilnya negatif tidak mengandung plastik, sehingga masyarakat dihimbau tenang dan tidak khawatir. "Dugaan bahwa beras mengandung plastik tidak terbukti," demikian disampaikan Kepala Badan POM, Roy Sparringa saat sidang di Pasar Induk beras di Cipinang, bersama Menteri Perdagangan dan Ka POLRI yang didampingi *Direktur Food Station* Tjipinang, Rabu (27/05/15).

"Pengujian terhadap sampel beras kami lakukan dengan hati-hati mengikuti prosedur baku yang telah ditetapkan. Pengujian



dilakukan secara bertahap termasuk proses validasi. Kami menggunakan baku pembandingan untuk menguji kesepadanan substansi antara sampel dengan beras pada umumnya. Kami bahkan menguji secara mendalam apakah ada logam berat, karena biasanya bahan plastik mengandung logam berat. Hasilnya menunjukkan batas normal bahkan beberapa logam berat pun tidak terdeteksi," lanjut

Roy.

Menteri Perdagangan juga mengutarakan bahwa pemerintah mengambil keputusan dan tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Pemerintah memberikan perhatian akan hal ini, khususnya menjelang bulan puasa dan lebaran, serta akan terus bekerja sama dengan kementerian dan instansi terkait

untuk melakukan pemantauan dan pengawasan pangan.

Badan POM juga telah mengintruksikan kepada Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia terus bekerja sama dengan lintas sektor dan dinas-dinas terkait untuk terus memantau perkembangan kasus ini, namun sampai dengan hari ini tidak ada yang melaporkan sampel beras yang mengandung plastik. @

BADAN POM RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)

Bangga namun tetap berupaya konsisten melakukan pengawasan Obat dan Makanan secara optimal! Sebagai bagian dari upaya peningkatan reformasi birokrasi di Badan POM, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara, Badan POM terus menerus melakukan pembenahan dengan berupaya memperbaiki pengelolaan keuangan negara, dan penyusunan laporan keuangan.

Pada tahun 2015, upaya ini membuahkan hasil dengan diakuinya perbaikan dan peningkatan kualitas laporan keuangan Badan POM oleh BPK berupa pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Badan POM tahun 2014. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Anggota VI BPK RI Bahrullah Akbar kepada Kepala Badan POM, Roy Sparringa, dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Badan POM tahun anggaran 2014, yang berlangsung hari ini 16 Juni 15 di Auditorium Gedung Tower BPK RI, Lantai 2, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat. Acara ini berlangsung bersamaan dengan penyerahan LHP untuk Kementerian Kesehatan RI.

Dalam sambutannya, Bahrullah Akbar

menyampaikan apresiasinya kepada Badan POM, bahwa berkat kerja keras pimpinan dan seluruh jajaran Badan POM maka BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangan Badan POM Tahun 2014. Selain itu, beliau menyebutkan bahwa dari 356 temuan yang ada selama ini, 92,9% telah ditindak lanjuti oleh Badan POM. Hal ini merupakan prestasi yang cukup membanggakan.

Peningkatan opini dari WDP ke opini WTP ini, selain karena kerja keras segenap jajaran di lingkungan Badan POM dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan penyusunan laporan keuangan Badan POM, juga berkat bimbingan dan pembinaan BPK.

Roy Sparringa dalam sambutannya menyampaikan bahwa "Diperolehnya opini WTP, bukan merupakan akhir, namun merupakan

awal dari pengelolaan keuangan Badan POM yang transparan dan akuntabel". Untuk itu, Badan POM telah menyusun arah kebijakan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), antara lain (1) pemantapan komitmen di semua level dan unit kerja dalam penerapan *quality management system* (QMS), sistem pemerintah intern pemerintah (SPIP) dan reformasi birokrasi, (2) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan Badan POM yang sesuai SAP, (3) intensifikasi monitoring pada proses dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI.

Badan POM juga telah menyusun rencana aksi (*action plan*) tindak lanjut rekomendasi BPK dan telah disampaikan kepada BPK pada tanggal 26 Mei 2015. Seluruh jajaran Badan POM mulai dari pimpinan tertinggi hingga staf pada level paling rendah akan senantiasa terus menerus berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi yang telah disusun tersebut, agar terwujud pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. @

BADAN POM TAK HENTI BERANTAS OBAT DAN MAKANAN ILEGAL

Operasi pemberantasan Obat dan Makanan ilegal terus dilakukan Badan POM. Hari ini, Kamis, 7 Mei 2015, bersama Bareskrim POLRI, Badan POM berhasil menggerebek rumah toko yang dijadikan gudang penyimpanan Obat dan Makanan ilegal, beralamat di Jl. Pahlawan Seribu Blok G2 No. 33 yang dikenal dengan Ruko Golden Boulevard. Dari luar, ruko ini tampak sama seperti ruko-ruko di sebelahnya, namun begitu masuk ke dalam, tampak tumpukan kardus berisi produk Obat dan Makanan tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia obat (BKO).

Hendri Siswadi, Kepala Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM menjelaskan bahwa dari ruko tersebut berhasil ditemukan setidaknya 80 item obat tradisional



(OT) mengandung BKO dan juga ilegal, 4 item pangan tanpa izin edar (TIE) berupa kopi mengandung BKO, 4 item kosmetik TIE, 4 item obat yg diduga palsu, serta 3 item obat ilegal. Temuan ini merupakan hasil pengintaian Badan POM selama kurang lebih satu bulan. Berawal dari temuan-temuan sebelumnya, Badan POM melakukan pengembangan kasus.

Dari hampir seratus item temuan hari ini, beberapa diantaranya merupakan produk yang sudah sering ditemukan pada operasi Badan POM sebelumnya, seperti jamu tradisional Madu Klanceng, kapsul Panjang Umur Antanan, kapsul Linu-Rat, dan Ponstan. Jumlah persis berapa kemasan produk ilegal yang ditemukan masih dalam proses penghitungan. Namun

nilai keekonomian ditaksir mencapai 3 milyar rupiah.

Badan POM akan menindaklanjuti temuan ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku pelanggaran di bidang Obat dan Makanan dapat dikenakan hukuman 15 tahun penjara dan atau hukuman denda 15 milyar. Masih adanya pelaku yang ingin mendapatkan keuntungan tanpa menghiraukan bahaya yang ditimbulkan, harus diperangi bersama. Masyarakat dapat ikut "berperang" dengan menjadi konsumen cerdas dan kritis, dengan cara membaca label produk sebelum membeli/mengonsumsi/menggunakan, atau melaporkan ke HALOBPOM 1500533 jika ada keraguan. @